

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi di dalam organisasi atau perusahaan yang tertuang dalam perencanaan yang sudah dibuat oleh organisasi atau perusahaan. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya.

Keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan suatu daerah dalam membiayai rumah tangga sendiri dalam arti sampai sejauh mana daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai keperluan-keperluan rumah tangga sendiri tanpa mengharapkan dan ketergantungan bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Beberapa penyebab utama ketergantungan terhadap pemerintah pusat antara lain kurangnya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu

mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selama ini, pungutan daerah yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Yang mana sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota, dan diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, adapun peraturan pemerintah tersebut menetapkan 27 jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tertanggal 1 Januari 2010 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diganti menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diberlakukannya Undang-

Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk mampu meningkatkan PAD-nya. Hal ini disebabkan dalam Undang-Undang tersebut menegaskan adanya penambahan 4 jenis pajak, diantaranya 3 jenis pajak kabupaten/kota dan 4 jenis retribusi.

Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah berada pada seluruh wajib pajak. Sedangkan pemerintah sebagai aparat, berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap seluruh pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kesiapan daerah dalam hal keuangan, baik dari sisi pengeluaran maupun penerimaan daerah. Karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi tergantung pada kondisi masing-masing daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam ataupun daerah yang intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi maupun rendah. Hal ini berdampak pada besar tidaknya basis pajak di daerah-daerah yang bersangkutan. Di sisi lain dilihat dari kebutuhan belanja untuk pelaksanaan berbagai fungsi publik setiap daerah juga sangat bervariasi,

dimana sarana prasarana dan infrastruktur lainnya masih belum ada yang memadai.

Untuk dapat mencapai maksud tersebut dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari pemerintahan pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Surabaya merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya sendiri disamping dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah seperti :

- 1) Perbaikan administrasi, pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah.
- 3) Mengupayakan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi menjadi Pajak Daerah (ILPPD Kota Surabaya, 2009).

Dengan demikian Pemerintah Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Jawa Timur yang juga kota terbesar ke tiga di Indonesia dan merupakan salah satu pusat dagang dan industri maka harus dapat menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya sebagian besar harus dengan kekuatan sendiri. Untuk itu perlu adanya sumber-sumber pendapatan, dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah.

Potensi-potensi yang ada di Surabaya seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk mendorong perekonomian di Kota Surabaya melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Pendapatan Daerah Kota Surabaya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Kinerja Keuangan Atas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari kajian latar belakang yang ada diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan membuat pengaruhantara lain :

1. Bagaimana kinerja keuangan pajak daerah di dinas pendapatan daerah di lihat dari rasio efektivitas?
2. Bagaimana kinerja keuangan di dinas pendapatan daerah di lihat dari rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah?
3. Bagaimana kinerja keuangan di dinas pendapatan daerah di lihat dari rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah?
4. Bagaimana kinerja keuangan di dinas pendapatan daerah di lihat dari analisis trend?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kinerja keuangan pajak daerah di dinas pendapatan daerah di lihat dari rasio efektivitas.
2. Mengetahui kinerja keuangan di dinas pendapatan daerah di lihat dari rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
3. Mengetahui kinerja keuangan di dinas pendapatan daerah di lihat dari rasio retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
4. Mengetahui kinerja keuangan di dinas pendapatan daerah di lihat dari analisis trend.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana kinerja keuangan atas pajak daerah dan retribusi daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menambah literatur dan wawasan bagi mahasiswa/mahasiswi untuk penelitian selanjutnya mengenai Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan kita bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berdampak pada peningkatan mutu layanan publik, sehingga kita sebagai wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu taat membayar pajak.

4. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan khususnya : Akuntansi Perpajakan dan Akuntansi Pemerintahan.

5. Bagi peneliti selanjutnya.

Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian berkaitan dengan masalah tersebut dan sebagai pertimbangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Agar lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi, maka diberikan sistematika penulisan skripsi secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang didapat dari jurnal, landasan teori yang dipakai baik teori secara umum dan teori khusus dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan memberikan penguraian mengenai metode penelitian antara lain adalah rancangan penelitian, batasan penelitian, populasi, sampel, data

dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam pemecahan masalah.

BAB IV : GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELETIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum subyek penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.